



LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR

2024



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan lindungannya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita dengan baik.

Tahun 2024 merupakan tahun yang cukup menantang, sejalan dengan terus dilakukannya upaya penguatan di berbagai sector pasca terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Sejalan dengan hal itu, KPP Pratama Semarang Timur selama tahun 2024 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Semarang Timur akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 202 dengan Kontrak Kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Semarang Timur.

Ultimate goal KPP Pratama Semarang Timur berupa Pencapaian Penerimaan Pajak yang diukur dengan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak. Pada tahun 2024 Pencapaian Penerimaan Pajak KPP Pratama Semarang Timur sebesar Rp1.173.530.689.491,00 atau sebesar 100.24% dari target yang ditetapkan. Hal ini

merupakan suatu capaian yang sangat pantas disyukuri dan diapresiasi karena KPP Pratama Semarang Timur mampu mencapai penerimaan lebih dari 100% selama tiga tahun berturut-turut.

Dengan seluruh sumber daya yang dimiliki dan diiringi dengan tekad yang kuat, KPP Pratama Semarang Timur beserta seluruh jajaran berkomitmen secara sungguh-sungguh akan selalu berupaya meningkatkan kinerja untuk memenuhi capaian target yang diamanahkan sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pendanaan pemerintah.

Di samping itu, melalui LAKIN yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Semarang Timur dalam menghimpun penerimaan negara. LAKIN KPP Pratama Semarang Timur diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang diemban, dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh pegawai KPP Pratama Semarang Timur untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa mendatang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk,
dan lindunganNya kepada kita semua.

#PAJAK KITA, UNTUK KITA

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om santi santi om.

Kepala KPP Pratama Semarang Timur



Ditandatangani secara elektronik
Pestamen Situmorang



RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/tantangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program dan kegiatan diwujudkan dengan penetapan sasaran/target kinerja secara terukur sesuai misi organisasi. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan instrumen penilai kinerja secara kuantitatif yang menjelaskan secara komprehensif mengenai capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan serta sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan. LAKIN ini memiliki tujuan utama sebagai alat pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja 2024.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pajak melakukan gelombang reformasi birokrasi dan reformasi kebijakan di bidang perpajakan. Reformasi tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak sesuai dengan visi dan misi DJP sekaligus untuk meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

Visi DJP Tahun 2020-2024 yaitu:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”.

Untuk mengimplementasikan visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan misi yaitu :

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, DJP menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK).

Tabel Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-Three

KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				101,04
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal			101,04
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,24%	100,24
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	102,13	102,13
<i>Customer Perspective</i>				104,47
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			108,58
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,24%	100,24
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	120,17%	120
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,36
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,36%	100,36
<i>Internal Process Perspective</i>				116,30
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			113,77
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	120
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100	107,53%	107,53
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	112,20%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			115,05
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	119,49%	119,67
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	105,49%	105,49
7	Penegakan Hukum yang efektif			112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120,00%	120
7b-CP	Tingkat efektivitas Penagihan	75%	96,76%	120
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100,00%	100
8	Data dan Informasi yang berkualitas			120
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	162,02%	120
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	82,80%	120
<i>Learning & Growth Perspective</i>				117,09
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			114,18

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	120,00%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	96,88	113,97
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	100	111,11
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel			120
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91	120,00	120
Nilai Kinerja Organisasi				109,55

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
Perencanaan Kinerja.....	8
Akuntabilitas Kinerja.....	14
Penutup.....	38
Lampiran	29

A. Latar Belakang

KPP Pratama Semarang Timur mulai beroperasi pada tanggal 6 November 2007 sebagai hasil dari Reformasi Birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak yaitu perubahan bentuk organisasi di mana Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak melebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

LAKIN KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2024 merupakan laporan berkala yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta visi dan misi selama tahun 2024 kepada seluruh stakeholder demi perbaikan kinerja KPP Pratama Semarang Timur.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Semarang Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Permasalahan utama atau *strategic issues* yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Timur merujuk pada tantangan besar yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka

panjang dan keberhasilan organisasi sendiri. Pada tahun 2024, diantara dari permasalahan utama yang dihadapi KPP Pratama Semarang Timur yaitu seperti Pelaksanaan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dimulai bulan Maret 2024. Dikarenakan Wajib Pajak KPP Pratama Semarang Timur yang didominasi oleh Importir yang sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan sulitnya memprediksi penerimaan dari Importir. Penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur sangat tergantung pada sektor importasi yang fluktuatif, sehingga berdampak pada fluktuasi pertumbuhan penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur Pada Tahun 2024.

Berbagai upaya kami lakukan dalam usaha mengatasi permasalahan utama atau *strategic issues* yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Timur tersebut seperti melakukan pengawasan pembayaran pajak masa melalui aplikasi SIDJP, Apportal, maupun aplikasi engine170, KPP Pratama Semarang Timur juga berupaya untuk mengawasi pembayaran Wajib Pajak 500 besar setiap seksi pengawasan maupun Wajib Pajak 100 besar setiap *Account Representative*, upaya-upaya seperti menindaklanjuti SP2DK yang masih *outstanding* yang diterbitkan oleh *Account Representative* sebelumnya, menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan bayar dan pelaporan, melakukan tindak lanjut atas data pemicu, data penguji, data LHA, data LIIP yang diturunkan baik dari Kantor Pusat DJP maupun Kanwil DJP Jawa Tengah I, melakukan kegiatan ekstensifikasi/penambahan WP terdaftar dengan memanfaatkan aplikasi yang ada diantaranya aplikasi Pandji, melakukan kerjasama dengan Bea Cukai untuk kegiatan yang terkait sektor impor merupakan langkah dan upaya kongkrit dalam wujud mengatasi permasalahan utama atau *strategic issues* KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur menyelenggarakan fungsi :

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak

4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Semarang Timur memiliki peran penting dalam menghimpun penerimaan pajak negara sebagai salah satu komponen pendapatan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPP Pratama Semarang Timur ikut serta dalam mendukung terwujudnya kemandirian pembiayaan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi KPP Pratama Semarang Timur terdiri atas :

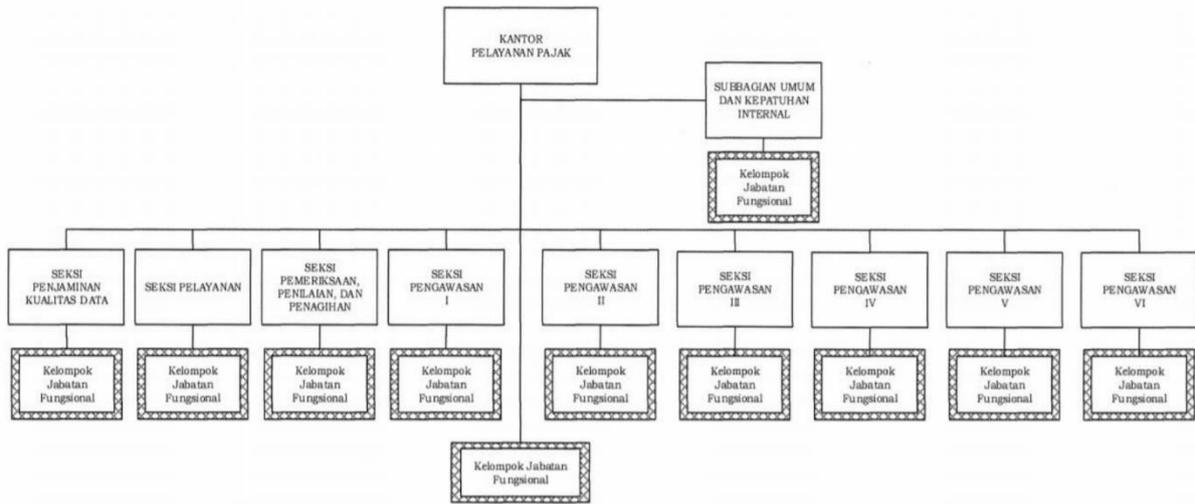
1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di KPP Pratama Semarang Timur adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan;
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan;
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan;

Gambar 1.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Timur

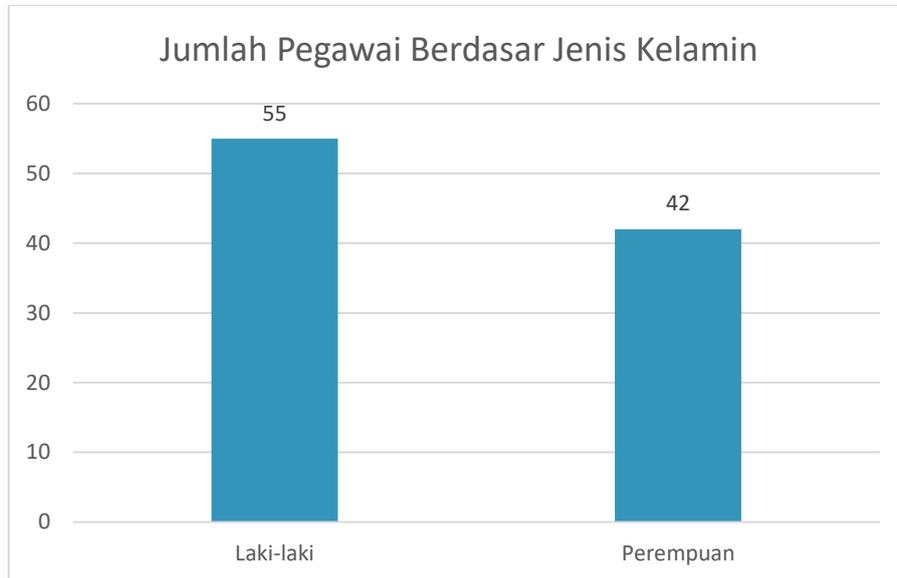


Sumber : <https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-05/Kanwil%20KPP%20KP2KP.pdf>

KPP Pratama Semarang Timur memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup beragam, berasal dari berbagai latar belakang ras, suku, dan agama yang beraneka ragam. Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) merupakan konsep yang mencakup upaya untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, disabilitas, atau latar belakang sosial-ekonomi, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan di lingkungan KPP Pratama Semarang Timur. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan kantor yang inklusif, adil, dan mengakui keragaman, dengan menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi akses atau partisipasi kelompok tertentu.

Data Sumber Daya Manusia atau Pegawai Organik KPP Pratama Semarang Timur per 31 Desember 2024 adalah dengan perbandingan jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki sejumlah 55 orang dengan pegawai berjenis kelamin perempuan sejumlah 42 orang. Meskipun secara data jumlah pegawai laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan namun dalam pelaksanaan tugas dan proses bisnis tidak menjadikan suatu halangan, justru keharmonisan tercipta dari segala perbedaan dan keragaman tersebut.

Gambar 1.2
Perbandingan Jenis Kelamin Pegawai KPP Pratama Semarang Timur



C. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Semarang Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Ringkasan Eksekutif

Menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dan permasalahan yang dihadapi; latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, fungsi dan struktur KPP Pratama Semarang Timur; peran strategis; struktur organisasi KPP Pratama Semarang Timur, serta sistematika pelaporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, sub bab ini berisi tentang amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN. Bab ini juga berisi mengenai Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK jika ada.

Dalam penyusunan PK perlu dijelaskan telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Sub Bab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah- langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini diuraikan tentang simpulan umum atas keberhasilan capaian kinerja organisasi yang ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi perbaikan peningkatan kinerja untuk tahun mendatang. Selain itu diuraikan pula inovasi, penghargaan dan achievement KPP Pratama Semarang Timur.

Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan. Perencanaan strategis sebagai langkah awal dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah harus dibuat agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional, maupun global. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 tercantum di dalam KEP-389/PJ/2020.

Secara umum Rencana Strategis (Renstra) KPP Pratama Semarang Timur memuat :

1. Visi dan Misi serta Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
2. Motto;
3. Janji Layanan.

1. Visi dan Misi KPP Pratama Semarang Timur

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur adalah
“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Dicintai Masyarakat Sadar Pajak”.

Misi KPP Pratama Semarang Timur

Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum secara adil;
- b. Memberikan pelayanan sepenuh hati sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Sumber daya manusia yang berintegritas, berkompeten dan professional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, KPP Pratama Semarang Timur tetap berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- a. Integritas
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Integritas yang dimaksud berwujud kejujuran yang menjadi harga mati dalam mengemban tugas negara.
- b. Profesionalisme
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetisi terbaik dengan penuh tanggung jawab.
- c. Sinergi
Membantu dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang

bermanfaat dan berkualitas. Sinergi ditugaskan sebagai salah satu kerjasama yang baik di internal maupun dengan eksternal, kerjasama yang baik berguna untuk memajukan bangsa dan negara.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang baik. Kesempurnaan ditunjukkan dengan pembaharuan produk hukum dan standar kinerja menjadi lebih baik dan semakin baik yang selalu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Motto KPP Pratama Semarang Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur memiliki Motto yaitu *"Loyalitas tanpa batas, militansi tanpa henti"*.

3. Janji Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur memiliki janji layanan yaitu : *"Memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak dengan Sepenuh hati, Ikhlas, Amanah, Pantang Menyerah"*.

Tujuan KPP Pratama Semarang Timur

Dengan memperhatikan visi dan misi, KPP Pratama Semarang Timur menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Merealisasikan rencana penerimaan pajak yang diamanahkan kepada KPP Pratama Semarang Timur;
2. Meningkatkan efektifitas pelayanan dan penyuluhan kepada WP;
3. Meningkatkan pengawasan kepada WP; dan
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.

Sasaran

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, sasaran yang akan dicapai KPP Pratama Semarang Timur adalah sebagai berikut :

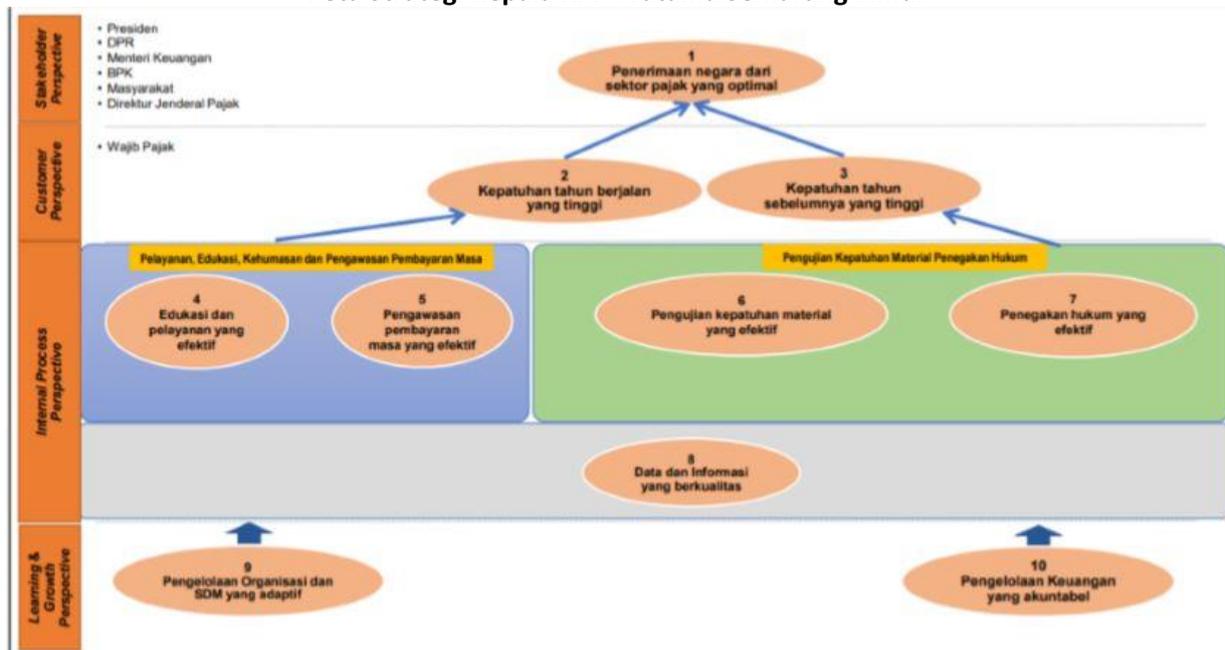
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif

7. Penegakan Hukum yang efektif
8. Data dan Informasi yang berkualitas
9. SDM yang kompeten
10. Organisasi yang berkinerja tinggi
11. Pengelolaan keuangan yang optimal

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Gambar 2.1
Peta Strategi Kepala KPP Pratama Semarang Timur



Sumber : Perjanjian Kinerja DJP Tahun 2024

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Agar tercapainya Sasaran Strategis (SS) yang lebih optimal di tahun 2024, DJP melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU Kepala KPP Pratama. Penyempurnaan (refinement) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja semakin baik dari tahun ke tahun, melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU dan Target IKU, penetapan IKU baru, dan penghapusan IKU.

1. Perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU

Reformulasi IKU meliputi perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS.

2. Penetapan IKU baru

IKU baru ditetapkan dalam rangka mengukur proses bisnis dan resources DJP yang selama ini belum terakomodasi dalam Kontrak Kinerja DJP.

Adapun rincian IKU baru KPP Pratama Semarang Timur adalah sebagai berikut:

- a. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
- b. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
- c. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
- d. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
- e. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
- f. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

3. Penghapusan IKU antara lain :

- a. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan
- b. Tingkat efektivitas Pemeriksaan
- c. Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan
- d. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi
- e. Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko

Dari hasil refinement telah dihasilkan IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Semarang Timur dan ditandatangani antara Kepala KPP Pratama Semarang Timur bersama Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I.

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja
KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				101,04
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal			101,04
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,24%	100,24
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perncanaan kas	100	102,13	102,13
<i>Customer Perspective</i>				104,47
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			108,58
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,24%	100,24
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	120,17%	120
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,36
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,36%	100,36
<i>Internal Process Perspective</i>				116,30
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			113,77
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	120
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100	107,53%	107,53
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	112,20%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			115,05
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	119,49%	119,67
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	105,49%	105,49
7	Penegakan Hukum yang efektif			112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120,00%	120
7b-CP	Tingkat efektivitas Penagihan	75%	96,76%	120
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100,00%	100
8	Data dan Informasi yang berkualitas			120
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	162,02%	120
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	82,80%	120
<i>Learning & Growth Perspective</i>				117,09
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			114,18
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	120,00%	117,50

9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	96,88	113,97
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	100	111,11
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel			120
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91	120,00	120

Nilai Kinerja Organisasi

109,55

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja meliputi pengukuran dan evaluasi kinerja serta analisis pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja berikut ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang ditetapkan dalam indikator kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Semarang Timur tahun 2024 dapat dilihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. NKO KPP Pratama Semarang Timur tahun 2024 adalah sebesar 109,55%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Semarang Timur

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder Perspective	30 %	30,31
Customer Perspective	20 %	20,89
Internal Process Perspective	25 %	29,08
Learning & Growth Perspective	25 %	29,27
Nilai Kinerja Organisasi		109,55

Selama tahun 2024, dari 20 IKU KPP Pratama Semarang Timur, semua IKU berstatus hijau. Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 109,55. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan NKO Tahun 2023 sebesar 104,08. NKO KPP Pratama Semarang Timur selama 5 tahun terakhir tersaji pada grafik berikut.



Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2020-2024

Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi dua tahun sebelumnya ditampilkan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi IKU KPP Pratama Semarang Timur

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Stakeholder Perspective				
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	103,36%	104,01%	100,24%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	113,70	102,13
Customer Perspective				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	104,20%	115,85%	100,24%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,44%	107,61%	120,54%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	29,21%	100,36%
Internal Process Perspective				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	84,00%	88,80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	86,03	84,39	107,53%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	106,47%	115,16%	120,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	213,37%	120,00%	120,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	119,49%	119,67%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	105,49%
7	Penegakan Hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	105,44%	98,78%	120,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	119,66%	107,19%	96,75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas			
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	131,87%	120,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	92,00%	73,60%
<i>Learning & Growth Perspective</i>				
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	94,26	96,05	96,88
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		100,00%	100,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	120,00	120,00

Capaian IKU untuk setiap Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Tabel 3.2.1.1
Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,24%	100,24
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,13	102,13

- Analisa Capaian Kinerja.

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1,173,530,689,491,00 atau mencapai 100,24% dari target sebesar Rp1.170.677.065.000,00.

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 102,13.

Tabel 3.2.1.2
Capaian Kinerja dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun terakhir

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Stakeholder Perspective				
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	103,36%	104,01%	100,24%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	113,70	102,13

Realisasi capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan realisasi 2 tahun sebelumnya, turun sebesar 3,77% dibandingkan

tahun 2023. Sedangkan IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan IKU yang baru ada di tahun 2023. Untuk realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 turun lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023, yaitu turun sebesar 11,57%.

Pada proses pencapaian target kinerja sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, terdapat isu utama yang mempengaruhi pencapaian target yaitu Pelaksanaan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dimulai bulan Maret 2024, kondisi wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur yang didominasi oleh importir. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan importir sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Hal ini tentu memiliki implikasi terhadap kegiatan penerimaan perpajakan KPP Pratama Semarang Timur karena wajib pajak importir dapat sewaktu-waktu berhenti melakukan kegiatan importansi.

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja.
 - 1) Melakukan pengawasan pembayaran pajak masa melalui aplikasi (sidjp, appportal, engine170);
 - 2) Mengawasi pembayaran wajib pajak 500 besar seksi/ 100 besar per Account Representative (AR);
 - 3) Menindaklanjuti SP2DK yang masih *outstanding*;
 - 4) Menerbitkan STP atas keterlambatan bayar dan pelaporan;
 - 5) Melakukan tindak lanjut atas data pemicu, data penguji, data LHA, data LIIP yang diturunkan baik dari Kantor Pusat DJP maupun Kanwil DJP Jawa Tengah I;
 - 6) Melakukan kegiatan ekstensifikasi/penambahan wajib pajak terdaftar dengan memanfaatkan aplikasi yang ada diantaranya aplikasi Pandji;
 - 7) Melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan yang terkait sektor impor.

- Selain isu utama, KPP Pratama Semarang Timur memiliki beberapa kendala terkait pencapaian target kinerja sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, antara lain :
 - 1) Ketergantungan penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur pada kegiatan impor yang dilakukan oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur;
 - 2) Sektor selain wajib pajak importir belum tergali secara maksimal;
 - 3) Wajib pajak importir yang berpindah NPWP bahkan pindah KPP terdaftar;
 - 4) Wajib pajak terdapat data potensi namun *ability to pay* (ATP) wajib pajak rendah;

- Untuk menghadapi kendala tersebut, KPP Pratama Semarang Timur menyusun rencana aksi sebagai berikut :
 - 1) Memaksimalkan penggunaan aplikasi yang ada termasuk pandji dan engine170 dalam rangka pengawasan WP.
 - 2) Mengusulkan pemeriksaan khusus/DSP3 atas SP2DK yang tidak ditindaklanjuti oleh WP.
 - 3) Memanfaatkan data pemicu, data penguji, data LHA, dan data LIPP pada Approweb untuk penggalan potensi pajak.
 - 4) Melakukan pembenahan/pemutakhiran data master file Wajib pajak.
 - 5) Melakukan usulan penilaian ke Penilai Pajak atas transaksi WP yang tidak wajar.
 - 6) Melakukan permintaan data kepada pihak lain dalam rangka mendukung penerimaan pajak.
 - 7) Melakukan bedah WP Strategis dan Kewilayahan

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Tabel 3.2.2.1
Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Customer Perspective				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,24%	100,24
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,54%	120,00

▪ Analisa Capaian Kinerja

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 1.130.431.739.406,00 atau mencapai 100,24% dari target sebesar Rp1.127.734.664.564,00.

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan Desember 2024 sejumlah 21.845 SPT atau mencapai 120,54% dari target sejumlah 18.178 SPT.

Tabel 3.2.2.2

Capaian Kinerja dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun terakhir

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Customer Perspective				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	104,20%	115,85%	100,24%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,44%	107,61%	120,54%

Realisasi IKU pada sasaran strategis kepatuhan tahun berjalan yang tinggi mengalami 1 IKU yang mengalami penurunan dibandingkan dengan 2 tahun terakhir yaitu IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan 1 IKU dengan kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan capaian sampai dengan 2 tahun terakhir yaitu di IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Keberhasilan peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata atas usaha-usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Timur.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja.
 - 1) Membuka LDK pelaporan SPT Tahunan di 19 Kantor Kelurahan dan 2 Kantor Kecamatan pada bulan Februari – Maret 2024;
 - 2) Mengirim pesan *whatsapp blast* imbauan pelaporan SPT Tahunan ke nomor telepon genggam wajib pajak;
 - 3) Kepala Seksi Pengawasan secara rutin (dalam hal ini 2 minggu sekali) melakukan monitoring daftar nominatif STP dan meminta kepada *Account Representative* untuk segera menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
 - 4) Melakukan pengawasan pembayaran pajak masa WP non importir dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia (sidjp, apportal, engine170).
 - 5) Melakukan kegiatan ekstensifikasi untuk menambah WP terdaftar.
 - 6) Melakukan pengawasan pembayaran pajak masa secara terfokus pada 500 Wajib Pajak Besar non importir Seksi Pengawasan/100 Wajib Pajak Besar non importir per *Account Representative*.
 - 7) Edukasi dan Penyuluhan kepada Wajib Pajak.

- Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - 1) Masih ada wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Untuk mengatasi hal ini, KPP Pratama Semarang Timur melakukan berbagai upaya alternatif solusi seperti melakukan edukasi/ sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi secara luring dan daring, pendampingan penyampaian SPT Tahunan di KPP;
 - 2) Ketergantungan penerimaan pajak PPM pada penerimaan pajak dari kegiatan importasi. Untuk kendala ini, KPP Pratama Semarang Timur melakukan kegiatan ekstensifikasi untuk menambah wajib pajak terdaftar, melakukan pengawasan pembayaran pajak masa secara terfokus pada 500 Wajib Pajak Besar non Importir Seksi Pengawasan atau 100 Wajib Pajak Besar non Importir per *Account Representative*.

- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja :
 - 1) Imbauan penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan melalui pesan *whatsapp blast*;
 - 2) Penyuluhan tidak langsung secara pasif kepada wajib pajak melalui *whatsapp centre*;
 - 3) Layanan di Luar Kantor;
 - 4) Pojok Pajak di *Mall*;
 - 5) Pembenahan *master file* wajib pajak dan implementasi NIK-NPWP;
 - 6) Pendampingan penyampaian SPT Tahunan di KPP.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dalam pencapaian kinerja :
 - 1) Pengusulan wajib pajak pailit keluar dari target pelaporan SPT WP Strategis;
 - 2) Inventarisasi Wajib Pajak aktif (Non Efektif secara Jabatan);
 - 3) Meningkatkan *taxbase* dengan melalui kegiatan ekstensifikasi;
 - 4) Mengawasi setoran rutin wajib pajak dengan prioritas wajib pajak besar.

- Rencana aksi ke depan :
 - 1) Meningkatkan *taxbase* melalui kegiatan ekstensifikasi;
 - 2) Melakukan edukasi dan konseling kepada wajib pajak sektor selain importir untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar;
 - 3) Memanfaatkan data baik yang bersumber dari internal maupun eksternal untuk meningkatkan penerimaan pajak PPM;
 - 4) Mengawasi setoran rutin Wajib Pajak dengan prioritas Wajib Pajak besar;
 - 5) Menerbitkan STP.

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Tabel 3.2.3.1
Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Customer Perspective				
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,36%	100,36

- Analisa Capaian Kinerja
Realisasi capaian IKU persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp43.098.950.085,00 atau sebesar 100,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp42.942.400.436,00.

Tabel 3.2.3.2
Capaian Kinerja dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun terakhir

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Customer Perspective				
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	29,21%	100,36%

- Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja :
 - Pemeriksaan *tax single* sesuai SE-15 Tahun 2018;
 - Melakukan *visit* ke tempat usaha wajib pajak dalam rangka penggalian potensi dan bedah wajib pajak;
 - Menindaklanjuti DSP4 Tahun 2024;
 - Melakukan analisis laporan keuangan dan equalisasi atas pelaporan SPT dan pembayaran pajak WP;
 - Mengusulkan pemeriksaan khusus.

- Analisis program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
KPP Pratama Semarang Timur melakukan analisis laporan keuangan dan equalisasi atas pelaporan SPT dan pembayaran pajak oleh wajib pajak dan memaksimalkan CRM IRE agar DPP yang diusulkan dapat tepat sasaran.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dalam pencapaian kinerja :
 - 1) Mengoptimalkan tindakan pemblokiran rekening penanggung pajak sampai dengan pemindahbukuan dan tindakan penyitaan sampai dengan lelang;
 - 2) Menindaklanjuti SP2DK Outstanding yang belum selesai;
 - 3) Melakukan usulan pemeriksaan khusus/ DSPP;
 - 4) Pemanfaatan data pemicu dan penguji yang telah tersedia di approweb.
- Rencana aksi ke depan :
 - 1) Tindak lanjut penagihan pajak terhadap Penunggak Pajak berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC);
 - 2) Optimalisasi tindakan penagihan atas piutang pajak macet dan mendekati daluwarsa penagihan;
 - 3) Optimalisasi penagihan pajak selain dari angka 1 dan 2;
 - 4) Perencanaan dan Pelaksanaan Penilaian untuk menentukan nilai pasar atau nilai wajar pembangunan properti, pengalihan atau pemanfaatan harta;
 - 5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Pemeriksaan;
 - 6) Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional dan Pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas;
 - 7) Pengawasan atas tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan;

4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Tabel 3.2.4.1
Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Internal Process Perspective				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,53%	107,53

- Analisa Capaian Kinerja

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,80% melebihi target yaitu 74,00%.

Realisasi capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sebesar 107,53%, IKU tersebut melebihi target yaitu 100,00%.

Tabel 3.2.4.2

Capaian Kinerja dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun terakhir

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Internal Process Perspective				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	84,00%	88,80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	86,03%	84,39%	107,53%

- Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:
 - 1) Bekerja sama dengan pemberi kerja dalam rangka kepatuhan SPT Tahunan (asistensi/surat);
 - 2) Penyuluhan perpajakan melalui kegiatan publikasi dengan melibatkan tokoh budaya/ tokoh masyarakat/ tokoh agama saat pekan panutan pelaporan SPT Tahunan.
- Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - 1) Masih terdapat wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak setelah dilakukan penyuluhan. Untuk mengatasi hal tersebut, KPP Pratama Semarang Timur melakukan Edukasi/Sosialisasi secara langsung aktif kepada wajib pajak Badan dan Orang Pribadi, Edukasi/Sosialisasi wajib pajak melalui media sosial (Live instagram), Mengadakan pojok pajak, LDK di Kecamatan/Pemberi kerja swasta & Instansi Pemerintah.
 - 2) Isu utama yang ada pada IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan adalah lambatnya umpan balik dari responden dan tidak mengetahui responden mana yang sudah mengisi survey. Untuk mengatasi hal tersebut, KPP Pratama Semarang Timur melakukan upaya berupa Mengirimkan data responden survei yang valid kepada Kanwil DJP Jawa Tengah I dan melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Tengah I selaku Eselon II terkait pelaksanaan survey yang dilakukan untuk mendapatkan data responden yang tidak bisa dihubungi oleh pihak ketiga.

- Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja :
 - 1) Publikasi melalui *whatsapp blast*;
 - 2) Edukasi perpajakan melalui *podcast, live* instagram;
 - 3) Mengadakan pojok pajak, layanan di luar kantor di kecamatan maupun pemberi kerja (instansi pemerintah dan swasta).

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dalam pencapaian kinerja :
 - 1) Penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi secara aktif untuk perubahan perilaku bayar;
 - 2) Optimalisasi pelayanan dan edukasi perpajakan melalui *whatsapp centre*;
 - 3) Penyuluhan kepada calon wajib pajak masa depan melalui kegiatan *Tax Goes To School (TGTS), Tax Goes To Campus (TGTC)*, dan pajak bertutur;
 - 4) Publikasi informasi perpajakan melalui media sosial seperti *Instagram, Facebook, dan Twitter*.

- Rencana aksi :
 - 1) Meneliti dan memilih database calon responden yang valid dan mendapatkan pelayanan dan penyuluhan oleh KPP;
 - 2) Pemilihan pihak ketiga sebagai pihak independen dalam melakukan survei yang lebih dikenal oleh masyarakat sehingga responden menjadi familiar dan dapat diketahui responden mana saja yang belum dan sudah dilakukan survei;
 - 3) Penyuluhan kepada calon wajib pajak masa depan melalui kegiatan *Tax Goes To School (TGTS), Tax Goes To Campus (TGTC)*, dan pajak bertutur.

5. Presentase Pengawasan Pembayaran Masa

Tabel 3.2.5.1
Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Internal Process Perspective				
5	Presentase Pengawasan Pembayaran Masa			
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	120,00

- Analisis Capaian Kinerja
Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 120,00%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 90%.

Tabel 3.2.5.2

Capaian Kinerja dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun terakhir

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Internal Process Perspective				
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	106,47%	115,16%	120,00%

- Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:
 - 1) Melakukan imbauan pembayaran PPN KMS terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri (KMS);
 - 2) Menerbitkan STP di luar daftar nominatif;
 - 3) Melakukan penggalian potensi untuk masa/tahun berjalan;
 - 4) Melakukan himbauan atas masa pajak yang dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak;
 - 5) Menentukan skala prioritas dalam melakukan tindak lanjut yang matching;
 - 6) Melakukan SMS Blast, telephone dan WhatsApp terhadap Wajib Pajak yang belum lapos SPT dan/atau belum melakukan pembayaran.

- Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - 1) Jumlah data pemicu dan penguji yang tersedia pada approweb cukup signifikan/banyak. Alternatif solusi yang dilakukan adalah menentukan skala prioritas dalam melakukan tindak lanjut *data matching*;
 - 2) NPWP baru hasil ekstensifikasi/tindak lanjut DSE yang menghasilkan pembayaran pajak masih rendah. Alternatif solusi yang dilakukan adalah Melakukan sms blast, telpon, dan WA terhadap WP yang belum lapor SPT dan/atau belum melakukan pembayaran pajak.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dalam pencapaian kinerja :
 - 1) Mengoptimalkan penambahan NPWP baru beserta pembayaran pajaknya dari kegiatan ekstensifikasi/ DSE;
 - 2) Mengoptimalkan tindak lanjut data perpajakan
 - 3) Mengoptimalkan penerbitan STP masa/atau pajak berjalan.

- Rencana aksi :
 - 1) Mengoptimalkan penerbitan STP masa/tahun pajak berjalan;
 - 2) Mengoptimalkan penambahan NPWP baru beserta pembayaran pajaknya dari kegiatan ekstensifikasi/DSE.

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

Tabel 3.2.6.1

Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Internal Process Perspective				
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,67%	119,67
6C-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	105,49%	105,49

▪ Analisis Capaian Kinerja

Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 120,00%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 119,67% melebihi target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 105,49%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

Tabel 3.2.6.2

Capaian Kinerja dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun terakhir

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Internal Process Perspective				
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	213,37%	120,00%	120,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	119,49%	119,67%

6C-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	105,49%
------	--	---	---	---------

- Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:
 - 1) Menyusun DPP kolaboratif.
 - 2) Menerbitkan SP2DK yang telah ditetapkan menjadi DPP.
 - 3) Menindaklanjuti seluruh SP2DK sampai dengan terbit LHP2DK.
 - 4) Mencari alamat Wajib Pajak yang terbaru. dan mengirimkan SP2DK kembali ke alamat yang baru
 - 5) Menerbitkan STP selain tahun berjalan yang terdapat di daftar nominatif STP maupun di luar daftar nominatif STP;
 - 6) Mengusulkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SP2DK secara selektif;
 - 7) Melaksanakan seluruh tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP secara tepat waktu.

- Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - 1) SP2DK dapat disanggah/ dibuktikan oleh wajib pajak sehingga SP2DK *close* tanpa realisasi. Alternatif solusi yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Timur adalah mengoptimalkan penerbitan SP2DK atas data pemicu dan penguji, melakukan seleksi wajib pajak yang akan diterbitkan SP2DK;
 - 2) *Data matching* muncul setelah penetapan DPP triwulan IV, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti melalui SP2DK. Solusi yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Timur adalah mengimbau wajib pajak tersebut sehingga wajib pajak membetulkan SPT dan/atau membayar potensi pajaknya.
 - 3) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP ke Kanwil secara tepat waktu.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dalam pencapaian kinerja :
 - 1) Menyeleksi wajib pajak yang akan diterbitkan SP2DK berdasarkan tingkat *ability to pay* (ATP);
 - 2) Menyelesaikan DPP tepat waktu;
 - 3) Memastikan wajib pajak yang terdapat data pemicu diterbitkan SP2DK.

- Rencana aksi ke depan :
 - 1) Melakukan pengayaan potensi pajak pada SP2DK melalui analisis seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang akan diterbitkan SP2DK, meskipun Wajib Pajak kewilayahan;

- 2) Memperkuat dasar koreksi potensi pajak pada SP2DK melalui penelitian data yang terdapat pada sistem internal DJP (approweb, apportal, sidjp, dan sebagainya) dan data eksternal seperti AEOI dll;
- 3) Memastikan keberadaan Wajib Pajak yang akan diterbitkan SP2DK melalui *visit* ke alamat Wajib Pajak dan/atau menghubungi Wajib Pajak melalui telepon/*whatsapp*;
- 4) Mempercepat penyelesaian SP2DK (diupayakan kurang dari 60 hari);
- 5) Mengusulkan pemeriksaan post audit untuk memenuhi kekurangan potensi pemeriksaan;
- 6) Terhadap Wajib Pajak yang terdapat data perpajakan selain tahun berjalan namun tidak termasuk kedalam DPP sehingga tidak dapat diterbitkan SP2DK, agar diimbau untuk membetulkan SPT nya terkait data perpajakan tersebut dan mengimbau Wajib Pajak menggunakan S-IMB.

7. Penegakan Hukum yang Efektif

Tabel 3.2.7.1
Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Internal Process Perspective				
7	Penegakan Hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	96,75%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00

- Analisis Capaian Kinerja

Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 120,00%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

Capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 120,00% melebihi target yang ditetapkan sebesar 75,00%.

Capaian Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 100,00%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

Tabel 3.2.7.2

Capaian Kinerja dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun terakhir

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Internal Process Perspective				
7	Penegakan Hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	105,44%	98,78%	120,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	119,66%	107,19%	96,75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	97.30%	100,00%

- Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:
 - 1) Berkoordinasi dengan kurator dalam melakukan tindakan penagihan;
 - 2) Mengidentifikasi pihak-pihak lain yang dapat menjadi penanggung pajak;
 - 3) Penelusuran lebih lanjut akan aset yang dimiliki wajib pajak untuk dapat menyelesaikan hutang pajak;
 - 4) Melakukan konseling dan himbauan terhadap wajib pajak terhadap piutang pajak yang belum terselesaikan

- Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - 1) Jumlah kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan pemeriksaan tidak maksimal. Alternatif solusi yang dilakukan adalah melakukan bedah WP antara Fungsional Pemeriksa Pajak dengan AR Seksi Pengawasan;
 - 2) Jumlah piutang pajak dengan status macet semakin bertambah. Atas kendala ini, KPP Pratama Semarang Timur melakukan konseling dan imbauan kepada wajib pajak yang memiliki piutang pajak yang belum terselesaikan.

- Analisis atas kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja :
 - 1) Menyusun proyeksi bahan baku pemeriksaan;
 - 2) Telah Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas bahan baku pemeriksaan;
 - 3) Penelusuran lebih lanjut akan aset yang dimiliki wajib pajak untuk dapat menyelesaikan hutang pajak.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dalam pencapaian kinerja :
 - 1) Menyusun profil penunggak pajak, dan menyusun analisis risiko ketidaktertagihan piutang pajak;

- 2) Memaksimalkan tindakan penagihan pajak sesuai dengan DSPC;
 - 3) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan untuk memastikan tercapainya target PKM tahun 2024.
- Rencana aksi ke depan :
 - 1) Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas bahan baku pemeriksaan;
 - 2) Membuat media pengawasan tunggakan pemeriksaan;
 - 3) Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan.
 - 4) Percepatan usulan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn);
 - 5) Permintaan usulan penilaian di awal triwulan;
 - 6) Tindakan penagihan antara lain penerbitan surat paksa, pemblokiran, penyitaan, lelang dengan lebih optimal.

8. Data dan Informasi yang Berkualitas

Tabel 3.2.8.1
Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Internal Process Perspective				
8	Data dan Informasi yang berkualitas			
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	73,60%	120,00

- Analisis Capaian Kinerja
Capaian realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sampai dengan Desember 2024 sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00%.

Capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan Desember 2024 sebesar 73,60% dari target sebesar 55,00%.

Tabel 3.2.8.2

Capaian Kinerja dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun terakhir

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Internal Process Perspective				
8	Data dan Informasi yang berkualitas			
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	131,87%	120,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	92,00%	73,60%

- Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:
 - 1) Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan secara langsung di wilayah yang diampu.
 - 2) Melaksanakan koordinasi secara proaktif dengan Kanwil dan KPP Pratama Semarang Tengah selaku koordinator

- Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan :
IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP untuk KPP di wilayah Kota Semarang menjadi IKU bersama.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dalam pencapaian kinerja :
 - 1) Melakukan kegiatan pengamatan untuk memperoleh data dan/atau kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan;
 - 2) Memanfaatkan data internal sebagai pemicu KPDL;
 - 3) Melakukan KPDL secara langsung di wilayah yang diampu;
 - 4) Melaksanakan koordinasi secara proaktif dengan Kanwil dan KPP Pratama Semarang Tengah selaku koordinator;
 - 5) Melakukan penghimpunan data regional dari ILAP.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Tabel 3.2.9.1

Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Learning & Growth Perspective				
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,88	113,97
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	111,11

- Analisis Capaian Kinerja

Capaian realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sampai dengan Desember 2024 sebesar 117,50 melebihi dari target sebesar 100,00.

Capaian realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan Desember 2024 sebesar 96,88 melebihi dari target sebesar 85,00.

Capaian realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan Desember 2024 sebesar 100,00 melebihi dari target sebesar 90,00.

Tabel 3.2.9.2

Capaian Kinerja dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun terakhir

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Learning & Growth Perspective				
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	94,26	96,05	96,88
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	100,00	100,00

- Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

- 1) Melaksanakan Kegiatan Bintal Bidang Rohani dalam bentuk Pelaksanaan Kegiatan Motivasi Harian (Doa Pagi) dan Pembacaan NNKK sepanjang Triwulan IV Tahun 2024;
- 2) Mengumpulkan jumlah responden yang lebih besar dari jumlah target responden (3 kali lipat);

- Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - 1) Melaksanakan Kegiatan Bintal Bidang Kompetensi dan Kejiwaan dalam bentuk Pelaksanaan Kegiatan Jumat Sehat Gembira (JUS SEGAR) sepanjang Triwulan IV Tahun 2024;
 - 2) Melaksanakan Kegiatan Bintal Bidang Kompetensi dalam bentuk Penyusunan Media Edukasi dan Layanan Informasi (MEDALI) sepanjang Triwulan IV Tahun 2024;
 - 3) Melaksanakan Kegiatan Bintal Bidang Ideologi dalam bentuk Sosialisasi Antikorupsi Triwulan IV Tahun 2024;
 - 4) Analisis atas kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja;
 - 5) Menyelenggarakan pelaksanaan *assesment* maupun uji kompetensi dengan baik lancar termasuk segala sarana dan prasarananya;

- Rencana aksi ke depan :
 - 1) IHT dan bimtek dengan tema sesuai kebutuhan untuk pemenuhan jam pelatihan tatap muka;
 - 2) Melaksanakan bintal pada empat bidang (kompetensi, ideologi, kejiwaan dan rohani) dan melaporkan sebelum batas waktu;
 - 3) Mengumpulkan data Wajib Pajak Kooperatif untuk diajukan sebagai responden SPIU Tahun 2025;
 - 4) Melaksanakan DKRO dan IHT imbauan pengelolaan kinerja tepat waktu.

10. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

Tabel 3.2.10.1
Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Learning & Growth Perspective</i>				
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00

- Analisis Capaian Kinerja
Capaian realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan Desember 2024 sebesar 120,00 melebihi dari target sebesar 100,00.

Tabel 3.2.10.2

Capaian Kinerja dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun terakhir

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Learning & Growth Perspective				
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	120,00	120,00

- Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
 - 1) Melakukan revisi dan optimalisasi anggaran guna menyesuaikan kebijakan nasional;
 - 2) Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama belanja modal;
 - 3) Menjaga konsistensi antara rencana kegiatan dan rencana penarikan dana (RPD).

- Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di KPP Pratama Semarang Timur adalah kebijakan pemotongan anggaran SPD hingga 50% dari sisa anggaran. Pemotongan ini berdampak langsung pada kemampuan kantor dalam menjalankan tugas-tugas yang memerlukan mobilitas dan koordinasi, terutama yang berkaitan dengan kunjungan lapangan, verifikasi pajak, dan kegiatan penyuluhan.

- Rencana aksi ke depan :
 - 1) Optimalisasi Teknologi Digital yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk menggantikan beberapa kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas. Misalnya, melakukan pertemuan dan penyuluhan secara daring.
 - 2) Penyusunan Ulang Prioritas Kegiatan Menyusun ulang prioritas kegiatan berdasarkan dampak dan urgensinya. Fokus pada kegiatan yang memberikan kontribusi besar terhadap capaian kinerja dan penerimaan pajak.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran KPP Pratama Semarang Timur tahun 2024 adalah sebesar Rp5.437.670.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp5.375.810.270,00 atau sebesar 98,86% dari total anggaran. Penyerapan anggaran tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,75% dibandingkan tahun lalu sebesar 99,61%

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Belanja s.d. Desember 2023

Keterangan	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu	Rp786.926.000	Rp4.311.648.000	Rp339.276.000	Rp5.437.670.000
Realisasi	Rp782.534.000	Rp4.254.275.340	Rp339.000.930	Rp5.375.810.270
Persentase	99,44%	98,67%	99,92%	98,86%
Sisa	Rp4.392.000	Rp57.192.660	Rp275.070	Rp61.859.730

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, KPP Pratama Semarang Timur telah melaksanakan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya. KPP Pratama Semarang Timur menerapkan pendekatan berbasis hasil dalam pengelolaan anggaran, dengan fokus pada alokasi dana untuk kegiatan yang memberikan dampak signifikan terhadap tujuan organisasi. Penggunaan anggaran dilakukan dengan cermat untuk menghindari pemborosan, serta pemantauan yang ketat terhadap pengeluaran untuk memastikan setiap dana yang digunakan memiliki justifikasi yang jelas dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Pengeluaran operasional dipangkas dengan mengurangi biaya-biaya yang tidak esensial, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, penggunaan alat tulis kantor yang lebih hemat, serta pengurangan biaya konsumsi dan penyewaan fasilitas yang tidak terlalu penting.

KPP Pratama Semarang Timur fokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dengan cara yang lebih efektif dan efisien, seperti pelatihan daring dan pembelajaran mandiri yang mengurangi biaya pelatihan tradisional. Selain itu, pemetaan kebutuhan keterampilan dilakukan untuk memastikan bahwa SDM yang ada dapat mendukung operasional organisasi secara maksimal. Kami juga melakukan audit aset

secara berkala untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki digunakan secara maksimal dan tidak ada aset yang terbengkalai atau tidak berfungsi.

D. Kinerja Lain-Lain

Selain pencapaian berupa kinerja yang memiliki indikator kinerja yang sudah ditetapkan, KPP Pratama Semarang Timur juga berhasil mendapatkan predikat Zona Integrasi Wilayah Bebas dari Korupsi dan melakukan inovasi, antara lain :

1. LiBasTerasi (Aplikasi Berkas Terintegrasi)

Pencarian berkas wajib pajak di ruang arsip yang terintegrasi.

2. Basundara (Barcode Survey Kepuasan Layanan dan Sarana)

Sebagai sarana survei kepada pengguna layanan baik TPT, Helpdesk, sarana dan prasarana, serta layanan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

3. Layanan Sachet 504

Layanan berupa link virtual untuk memudahkan Wajib Pajak secara mandiri untuk mendapatkan informasi layanan, formulir, konsultasi, peraturan terbaru, dan daftar kelas pajak. Wajib pajak dapat mengakses layanan linktree 504 di alamat linktr.ee/pajaksemarangtimur atau bit.ly/kppsmgtimur. Dalam linktree disediakan berbagai formulir permohonan, persyaratan permohonan, Standar Pelayanan, Aplikasi E-faktur, Tutorial Perpajakan, informasi media sosial kantor, peraturan dan berita perpajakan, kontak konsultasi yang dapat dihubungi, dan Pendaftaran kelas pajak.

4. Bestie UMKM

Pembinaan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur melalui grup *Whatsapp*

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Tidak ditemukan evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPP Pratama Semarang Timur. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Semarang Timur tahun 2024 ini adalah hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan KPP Pratama Semarang Timur secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan KPP Pratama Semarang Timur.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian besar indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi masih ada indikator yang capaiannya berada di bawah target. Hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Semarang Timur tahun 2024 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 20 IKU KPP Pratama Semarang Timur, semua IKU berstatus hijau. Di tengah kondisi ekonomi nasional dan global yang berfluktuatif KPP Pratama Semarang Timur mengumpulkan penerimaan sebesar Rp1,173,530,689,491,00 dari target sebesar Rp1.170.677.065.000,00.

Menghadapi tantangan tahun 2024, KPP Pratama Semarang Timur akan selalu berupaya untuk mengamankan APBN pada sektor penerimaan perpajakan. Rencana aksi pengamanan penerimaan pun telah disusun agar KPP Pratama Semarang Timur mampu menjalankan visi misi dengan baik dalam upaya pencapaian target penerimaan perpajakan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Semarang Timur. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan.

LAMPIRAN



**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR
KANWIL DJP JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

NOMOR: 5/WPJ.10/2024

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada KPP Pratama Semarang Timur, saya menyatakan bahwa :

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan manajemen risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

Semarang, 29 Januari 2024

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Pestamen Situmorang



**DAFTAR RISIKO
KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Tahun	Proyeksi Akhir Tahun
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1.1 Penerimaan pajak yang berasal dari sektor perdagangan besar tidak mencapai target	24	11
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2.1 Penurunan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	13	6
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3.1 Pemeriksaan tahun sebelumnya tidak dilaksanakan secara optimal	6	6
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4.1 Layanan elektronik gagal diakses oleh Wajib Pajak	3	3
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	5.1 Persentase pengawasan pembayaran masa tidak memenuhi target yang ditetapkan	2	2
6	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	6.1 Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	6	6
7	Penegakan Hukum Yang Efektif	7.1 Penyelesaian pemeriksaan tidak tepat waktu	6	6
8	Data dan informasi yang berkualitas	8.1 Gangguan terhadap sistem informasi yang berjalan di unit	9	9
9	SDM yang kompeten	9.1 Pegawai yang ada pada unit tidak dapat mencapai output/target yang ditetapkan	8	8
10	Organisasi yang berkinerja tinggi	10.1 Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak hukum	16	11
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang Optimal	11.1 Pengelolaan anggaran tidak efektif dan efisien	13	11

Semarang, 29 Januari 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Pestamen Situmorang

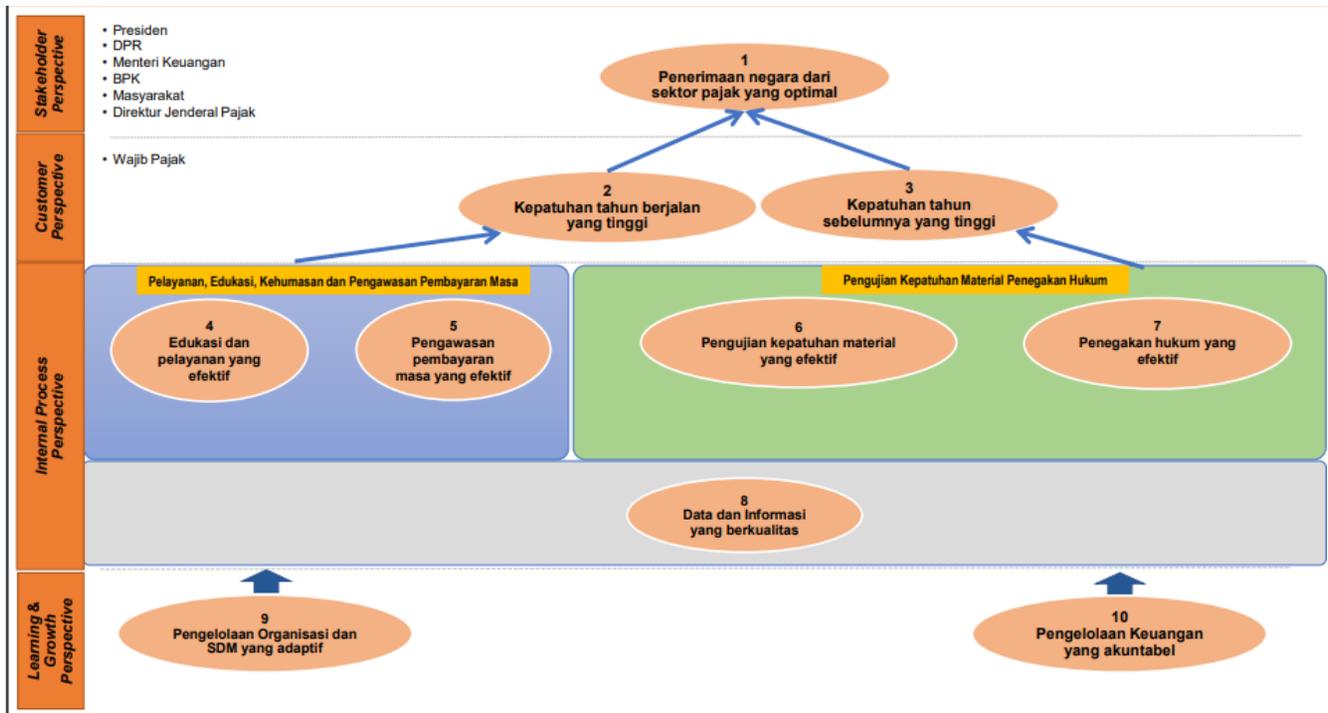




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-13/WPJ.10/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SEMARANG TIMUR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 992,670,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 439,182,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 264,357,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 289,131,000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 4,445,000,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3,641,683,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 803,317,000
Total	Rp 5,437,670,000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I,

Semarang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Semarang Timur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Max Darmawan



Ditandatangani Secara Elektronik
Pestamen Situmorang



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	25 %	49%	49%	77%	77%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25 %	49%	49%	77%	77%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Semarang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Semarang Timur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Pestamen Situmorang



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase Perubahan Perilaku Laport Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan	Optimalisasi Edukasi Dan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak	Menunjang Peningkatan Penerimaan, Peningkatan Kepercayaan Stakeholder, Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	Q1 - Q4 a. Melakukan Kegiatan Penyuluhan Langsung Secara aktif secara one on one kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam DSPT Kolaboratif b. Melakukan Kegiatan Penyuluhan Langsung Secara aktif secara one to many kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam DSPT Kolaboratif maupun DSPT Mandiri; c. Kelas Pajak	Q1 -Q4 perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pelayanan	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Optimalisasi Sosialisasi, Penyuluhan Dan Kelas Pajak Dengan Memanfaatkan Berbagai Kanal Informasi	Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Meningkatkan Reputasi Dan Persepsi Atas DJP	Q1 Q4 a. Mengirimkan surat pemberitahuan, Surat Teguran, SMS Blast; b. Layanan tatap muka langsung maupun tidak langsung; c. Survei Kepuasan Pelayanan Kantor Pajak	Q1 - Q4 a. Hasil survey kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan kehumasan yang memuaskan	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pelayanan	-
3	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	a. Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis; Dan b. Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)	Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak	Q1 - Q4 a. Melakukan Penelitian atas Kepatuhan Pembayaran WP per Jenis Pajak (dengan memanfaatkan tabelaris pembayaran Approweb, Engine, dan Alat Bantu Lain); b. Melakukan Visit c. Menerbitkan Teguran dan SP2DK, Dilanjutkan dengan Penerbitan STP Pengawasan Pembayaran Masa.	Q1 -Q4 a. Teguran b. SP2DK c. STP d. Visit Wajib Pajak	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	a. Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis; b. Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	a. Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Yang Tinggi b. Penerimaan PKM 2023 Yang Lebih Baik c. Mengurangi Jumlah SP2DK Outstanding	Q1 - Q4 Meminta Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan;	Q1 - Q4 a. LHPt b. SP2DK c. LHP2DK	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-
5	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	a. Optimalisasi Pemanfaatan Data Dalam Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material WP; b. Tindak Lanjut Temuan BPK Atas Data STP	Tingkat Kepatuhan Material Wajib Pajak Yang Tinggi	Q1 -Q4 a. Menerbitkan STP Selain Tahun Berjalan Baik Dari Dafnom maupun Di Luar Dafnom; b. Melakukan Tindak Lanjut atas WP Yang Memiliki Data Pemicu Selain Tahun Berjalan	Q1 - Q4 a. STP b. LHPt	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-
6	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Optimalisasi pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP	Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan	Q1 -Q4 Rapat Komite Kepatuhan	Q1 -Q4 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
7	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	a. Optimalisasi SKP Terbit Tahun Berjalan dan SKP Disetujui; b. Optimalisasi Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu c. Optimalisasi Kegiatan Penilaian	Meningkatnya Kepercayaan Stakeholders Dan Kepatuhan Wajib Pajak Agar Dapat Menunjang Penerimaan Negara Melalui Efektivitas Tindakan Pemeriksaan dan Penilaian.	Q1 -Q4 a. Percepatan dan Monitoring Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan b. Melaksanakan kegiatan Penilaian.	Q1 -Q4 a. LHP b. SKP c. Alat Keterangan d. Laporan Penilaian	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
8	Tingkat Efektivitas Penagihan	Keberhasilan Tindakan Penagihan Pajak Terhadap WP/PP Dalam Rangka Mencairkan Piutang Pajak	Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder Dan Kepatuhan Wajib Pajak Agar Dapat Menunjang Dan Mengamankan Pendapatan Negara Yang Optimal Melalui Peningkatan Efektivitas Tindakan Penagihan.	Q1 - Q4 a. Melakukan Tindakan Penagihan Terhadap Wajib Pajak DSPC; b. Menindaklanjuti DSPC; c. Melakukan Pencairan DSPC	Q1 - Q4 a. Surat Teguran b. Surat Paksa c. SPMP	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
9	Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Melakukan penelitian dan pengamatan secara komprehensif atas SP2DK dan berkas pemeriksaan yang diindikasikan ada tindak pidana perpajakan	Meningkatnya penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material serta optimalisasi kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak	Q1 - Q4 a. Penelitian dan pengamatan secara komprehensif b. Pembahasan bersama Komite Kepatuhan	Q1 - Q4 Data hasil penelitian dan pengamatan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Seksi Pengawasan 1,2,3,4,5,6 FPP	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
10	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	a. Menyediakan Data Potensi Pajak Yang Akurat Dan Lengkap b. Meningkatkan Efektivitas Peranan KPP Dalam Mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.	Data Potensi Pajak Yang Akurat melalui KPDL	Q1 - Q4 a. Pengumpulan Data Lapangan b. Perekaman dan Validasi Data KPDL	Q1 - Q4 KPDL Yang Telah Divalidasi	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-
11	Persentase Penghimpunan Data Regional Dari ILAP	Mengawasi Pihak Pemberi Data Dalam Menyampaikan Data Sesuai Yang Ditetapkan Di Dalam Peraturan Menteri Keuangan Dan Perjanjian Kerja Sama Antara DJP-DJPk- Pemerintah Daerah, Serta Bentuk Kerja Sama Lainnya	Data, Informasi, Dan Insight Yang Mampu Memberikan Nilai Tambah Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan.	Q1 - Q4 Menerima dan Menghimpun Data Regional Yang Bersumber Dari ILAP	Q1 - Q4 Data dan Informasi Yang Berkualitas	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
12	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Kompetensi	Mencapai Target JPM <i>Assesment Center</i> Bagi Pejabat Struktural, dan Kelulusan Ujian Kompetensi Teknis Bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum	Q1 - Q4 a. Melakukan Usulan Peserta Pelatihan/ Diklat b. Mengkoordinir Pelaksanaan <i>Assesment Center</i> dan Ujian Kompetensi Teknis	Q1 Kelulusan Ujian Kompetensi Teknis Semua Peserta Ujian Q4 Capaian JPM <i>Assesment Center</i> ≥ 80%	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
13	Indeks Penilaian Integritas Unit	Optimalisasi Penguatan Integritas dan Kode Etik Pegawai Melalui Kegiatan Formal	a. Meningkatkan Integritas Pegawai Sesuai Kode Etik dan Kode Perilaku Yang Berlaku	Q1 - Q4 a. Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku b. Kegiatan IHT, <i>Morning Activity, Knowing Your Employee</i>	Q1 - Q4 Laporan Kegiatan Pemantauan	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
14	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Perencanaan, pemantauan atas realisasi IKU dan rencana Mitigasi Risiko	a. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kinerja Organisasi b. Meminimalkan Terjadinya Risiko dan Dampak Risiko Yang Ditimbulkannya	Q1 - Q4 Memitigasi risiko dan melakukan pemantauan rencana mitigasi risiko	Q1 Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung Q1 - Q4 Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Optimalisasi Pengawasan Anggaran	a. Penyerapan Anggaran Yang Optimal b. Pencapaian <i>Output</i> dan Efisiensi Anggaran	Q1 - Q4 Evaluasi Pengelolaan Anggaran Oleh Tim Keuangan	Q1 - Q4 Usulan Revisi Anggaran	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Semarang Timur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Pestamen Situmorang



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Ir. Pestamen Situmorang, M.A.	NAMA	Ir. Max Darmawan, M.Tax	
NIP	196903251993101001	NIP	196808071995031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	<p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Semarang, 31 Januari 2024
 Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Pestamen Situmorang
 196903251993101001



Ditandatangani secara elektronik

Max Darmawan
 196808071995031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	96 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	25 %	49%	49%	77%	77%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25 %	49%	49%	77%	77%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%



8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85



19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Pegawai yang Dinilai,

Semarang, 31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Pestamen Situmorang
196903251993101001



Ditandatangani secara elektronik

Max Darmawan
196808071995031001

